



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAGYANINGTYAS ANGGOROWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 159253

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 260.000.000

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI  
Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI  
Rp. 220.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 341.600.000

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA POLYGON XTRADA 5.0 27.5"  
2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
2. MOBIL, HONDA CITY GD8 1,5 VTI AT Tahun 2007, HASIL  
SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5-E GLS (4X2) M/T Tahun  
2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 110 D1A02N19M1 A/T Tahun 2019,  
HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOBIL, SUZUKI CARRY PICK UP/ST 150-PICK UP Tahun 2014,  
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 35.792.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 539.764.317



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.177.156.317
III. HUTANG	Rp.	44.177.439
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.132.978.878

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.